



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3876 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula sebanyak Rp.2.922.021.699.832,72 bertambah sebanyak Rp.142.682.119.717,27 sehingga menjadi Rp.3.064.703.819.549,99 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	2.709.871.336.952,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>52.561.818.928,37</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp 2.762.433.155.880,37
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.922.021.699.832,72	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>142.682.119.717,27</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp 3.064.703.819.549,99
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp (302.270.663.669,62)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp	252.150.362.880,72	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>50.120.300.788,90</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp 302.270.663.669,62
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp	40.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(40.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp -
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			Rp <u>302.270.663.669,62</u>
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp <u>-</u>

### Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	a. Semula	Rp	817.000.396.952,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>67.561.818.928,37</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan			Rp 884.562.215.880,37
b.	Dana Perimbangan			
	a. Semula	Rp	1.806.768.440.000,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(40.485.802.000,00)</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp1.766.282.638.000,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan			
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
	1). Semula	Rp	86.102.500.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>25.485.802.000,00</u>	
	Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 111.588.302.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah			
a. Semula	Rp	711.679.306.721,08	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>78.460.128.862,96</u>	
Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan			Rp 790.139.435.584,04
b. Hasil Retribusi Daerah			
a. Semula	Rp	12.127.100.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.811.572.850,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp 9.315.527.150,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1). Semula	Rp	5.500.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan			Rp 5.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
a. Semula	Rp	87.693.990.230,92	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(8.086.737.084,59)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 79.607.253.146,33

(3) Dana Perimbangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil			
a. Semula	Rp	228.805.440.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp 228.805.440.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp	1.046.862.622.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp 1.046.862.622.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1). Semula	Rp	505.614.576.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(15.000.000.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp 490.614.576.000,00
d. Dana Insentif Daerah			
a. Semula	Rp	25.485.802.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(25.485.802.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp -

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah			
a. Semula	Rp	86.102.500.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp 86.102.500.000,00
b. Dana Darurat			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp -
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp -
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>25.485.802.000,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp 25.485.802.000,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp -
f. Sumbangan Pihak ketiga			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga setelah perubahan			Rp -

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
a. Semula	Rp	1.561.707.981.959,72	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>106.039.499.818,27</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp 1.667.747.481.777,99
b. Belanja Langsung			
a. Semula	Rp	1.360.313.717.873,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>36.642.619.899,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp 1.396.956.337.772,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp	776.087.070.545,72	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>55.585.930.480,27</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 831.673.001.025,99
b. Belanja Bunga			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp -
c. Belanja Subsidi			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp -
d. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp	276.570.769.060,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.511.450.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 289.082.219.060,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp	750.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 750.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
a. Semula	Rp	386.269.536.485,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>60.299.040.628,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 446.568.577.113,00
g. Belanja Bantuan keuangan			
a. Semula	Rp	116.835.479.172,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(21.740.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 95.095.479.172,00
h. Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp	5.195.126.697,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(616.921.290,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 4.578.205.407,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp	23.620.273.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>44.958.120.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 68.578.393.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp	829.423.291.799,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.563.093.929,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan			Rp 850.986.385.728,00
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	507.270.153.074,00	
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(29.878.594.030,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 477.391.559.044,00



Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan			
a. Semula	Rp	252.150.362.880,72	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>50.120.300.788,90</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 302.270.663.669,62
b. Pengeluaran			
a. Semula	Rp	40.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(40.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah			
a. Semula	Rp	125.793.001.881,15	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>176.477.661.788,47</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 302.270.663.669,62
b. Pencairan dana cadangan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
a. Semula	Rp	126.357.360.999,57	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(126.357.360.999,57)</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp -
f. Penerimaan piutang daerah			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan setelah perubahan			Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp -
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah			
a. Semula	Rp	40.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(40.000.000.000,00)	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp -
c. Pembayaran pokok utang			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan setelah perubahan			Rp -
d. Pemberian pinjaman daerah			
a. Semula	Rp	-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan setelah perubahan			Rp -

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
  - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 23 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2019 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR (9-277/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Tingkat I/IV.b  
NIP. 19630306 198603 1 015